

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KEGIATAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH DI SMA KHADIJAH SURABAYA

Harmita Dian Nastiti

094254021 (PPKn, FIS, UNESA) harmitadiann@yahoo.com

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FIS, UNESA) totoksuyantounesa@gmail.com

Abstrak

OSIS merupakan salah satu organisasi yang menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan pembelajaran nyata dalam berpolitik secara demokratis pada tataran sekolah. Nilai-nilai demokrasi yang dijadikan variable dalam penelitian ini adalah nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dan menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembagau. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan sampel sebesar 37 pengurus OSIS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dalam persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya terlaksana dalam berbagai bentuk kegiatan dan sudah terimplementasi dengan sangat baik. Implementasi nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam kegiatan pengambilan keputusan sebesar 86,89% atau masuk ke dalam kategori sangat baik, implementasi nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertanggung jawab, terjalin kerjasama, adanya komunikasi dan keterbukaan sebesar 85,06% atau masuk kedalam kategori sangat baik. Implementasi nilai demokrasi tentang penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga menunjukkan sebesar 87,50% atau masuk ke dalam kategori sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah terimplementasi dengan sangat baik dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMA Khadijah Surabaya

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi , Nilai Demokrasi dan OSIS.

Abstract

Student council is one of organizations which every activity is done based on a real education in politic democratically at the level of school. The democracy values which becomes variable in this research is democracy values by Henry b. Mayo is recognizing and considering reasonable the diversity and resolving disputes peacefully and institutionally. The research used quantitative research with descriptivw method. The sample of the research consisted of 37 management of student council. The data collected by interview, questionnaire, observation, and documentation while the analysis technique used descriptive quantitative in the percentage. The result showed that the implementation of democracy values in activity of student council at SMA Khadijah Surabaya was carried on some kinds of activity which has implemented well. The implementation of democracy values about participating and assuming fair of diversity in decision activity was 86,89% or included into category very good. The implementation of democracy values about participating and assuming fair of diversity in doing activity responsibility, establishing cooperation, communication and openness wa 85,06% or included into category very good. The implementation of democracy values about the peaceful settlement of disputes and institutionalized showed was 87,50% or included into category very good. Based on the explanation above, it can be concluded that democracy values have implemented very good in activity of student council at SMA Khadijah Surabaya.

Keywords: Democracy Education , Democracy Values and OSIS.

PENDAHULUAN

Pengertian dan pelaksanaan demokrasi disetiap negara berbeda, hal ini ditentukan oleh sejarah, budaya dan pandangan hidup, dasar negara serta tujuan negara

tersebut. Sesuai dengan pandangan hidup dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu pada landasan idiil dan landasan konstitusional UUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan

rakyat seperti yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945: “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan”. Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia berbagai hal berkenaan dengan hubungan negara dan masyarakat telah diatur di dalam UUD 1945. Para pendiri negara (*founding father*) berkeinginan kuat agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Hal itu di tandai dengan perubahan bentuk demokrasi yang pernah di laksanakan di Indonesia.

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang ditandai dengan adanya partisipasi warga negara dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih. Warganegara telah menggunakan haknya untuk ikut serta menyalurkan aspirasi dalam pemerintahan, melalui wakil yang terpilih. Menurut Mayo dalam Fuady (2010:78) bahwa:

“Demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan berpolitik.”

Sependapat dengan penjelasan Mayo, pada dasarnya suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negaranya, dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki wawasan, menyadari akan keharusannya serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan status dan peranannya dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan budaya demokrasi, masyarakat harus memahami mengenai konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Kaitannya dengan pemahaman masyarakat maka diperlukan usaha yang efektif untuk menyampaikan maksud dari konsep yang ada dalam nilai-nilai demokrasi. Dan perwujudan melalui proses belajar tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Secara esensial pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan budaya demokrasi dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Demokrasi

tidak sekadar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi didalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk menyosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi.

Pengembangan budaya demokrasi tidaklah menghilangkan nilai-nilai demokrasi yang sudah ada sebagaimana dalam musyawarah untuk menemukan mufakat dan telah mengakar dalam masyarakat, namun kultur demokrasi diharapkan terus dikembangkan agar menghasilkan sistem demokrasi yang lebih ideal. Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat melahirkan budaya demokrasi yang semakin dinamis dan mendapatkan perhatian lebih besar. Inovasi-inovasi pengembangan demokrasi harus dapat dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan budaya demokrasi yang ideal melalui pendidikan demokrasi.

Sistem persekolahan adalah salah satu lembaga untuk mewujudkan sistem sosial yang lebih baik dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, yaitu mewujudkan cita-cita kolektif. Pendidikan yang diselenggarakan hanya terbatas pada sistem persekolahan semestinya dimaknai sebagai sebuah strategi kebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan merupakan medium transformasi nilai-nilai budaya, penguatan ikatan-ikatan sosial antarwarga masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan formal, sekolah sebagai pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif untuk menumbuhkan berbagai kualitas pribadi peserta didik. Oleh karena itu sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberi keteladanan, membangun kamauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokrasi.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 3, yang dinyatakan bahwa :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peadaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

(http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_20_Tahun_2003)

Dari landasan normatif di atas menandakan bahwa esensi pendidikan demokrasi di Indonesia menjadi fokus kajian yang dilakukan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di tingkat sekolah, pendidikan demokrasi diintegrasikan dalam kurikulum maupun kegiatan di luar pembelajaran. Mata pelajaran yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan demokrasi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sedangkan untuk kegiatan di luar pembelajaran, dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis, dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang menggambarkan keadaan masyarakat yang akan mereka hadapi di luar lingkungan sekolah.

Sekolah dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang memang dirancang agar siswa memiliki wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mereka, sekaligus memberikan cara bagaimana mereka harus membuat keputusan-keputusan dan memupuk ketrampilan berpartisipasi dalam permasalahan demokratis. Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah diharapkan memunculkan kemampuan siswa yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian dapat membentuk budaya demokratis sejak awal.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Khadijah Surabaya yang berada di kawasan kota Surabaya, tepatnya berada di Jl. Ahmad Yani 2-4 Surabaya. SMA Khadijah Surabaya merupakan sekolah berbasis agama Islam favorit yang terimplementasi ISO 9001:2008 dan terakreditasi A yang memadukan unsur pembelajaran pesantren (klasik) dengan sekolah umum (modern) yang berada di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah. SMA Khadijah Surabaya mempunyai visi pusat pendidikan Islam internasional yang mencetak SDM santun, unggul dan kompetitif serta mempunyai misi menumbuhkan, unggul dan kompetitif serta mempunyai misi menumbuhkan penghayatan dan pengalaman Aswaja yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Sebagai suatu organisasi, OSIS memiliki sebuah peran dalam rangka membina kesiswaan. OSIS sebagai salah satu wadah sangat mendukung pembentukan nilai-nilai demokrasi peserta didik, karena di dalam OSIS siswa dituntut agar dapat berperilaku dewasa dan dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bidang yang

dikembangkan yang sudah dibuat dalam program kerja. OSIS merupakan satu-satunya organisasi di sekolah di SMA Khadijah Surabaya dan memiliki susunan pengurus dan program kerja yang terstruktur. Kegiatan-kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya juga menunjukkan bentuk keaktifan dan kreativitas dari semua pengurus dan anggota dari OSIS.

Hal ini sependapat dengan hasil wawancara dengan Staff Pembina II, Ibu Khusrotul Lailiyah S. Pd, “OSIS di SMA Khadijah memang menunjukkan peningkatan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang semakin baik dari periode sebelum-sebelumnya. Kreatifitas pengurus sangat tinggi dan bukan hanya itu, OSIS juga membangun relasi yang baik dengan siswa-siswa khadijah yang notabene juga anggota OSIS. Hampir di setiap kegiatan yang berskala besar, pengurus OSIS melibatkan semua anggotanya untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dari kepanitiaan, jadi terselenggaranya kegiatan sekolah bukan hanya bentuk kesuksesan OSIS. Tapi bentuk kreatifitas semua warga SMA Khadijah.”

Dari penuturan hasil wawancara dengan dengan Staff Pembina II, Ibu Khusrotul Lailiyah S. Pd, menunjukkan bahwa Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMA Khadijah merupakan organisasi yang mendorong setiap peserta didik untuk aktif dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan mengkaji implementasi nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada didalam kegiatan OSIS. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul “Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah Di SMA Khadijah Surabaya”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMA Khadijah Surabaya?

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dari pengertian tersebut demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, dan merupakan hak bagi rakyat untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan pemerintahan. Sehingga rakyat mempunyai kekuasaan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Winarno (2009:97), dalam perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi juga dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Demokrasi membutuhkan

usaha nyata dari setiap warga negara maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dipandang penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau masyarakat dan pemerintahan yang baik. Mayo (dalam Budiarto, 2005:62-64) merinci nilai-nilai demokrasi ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap masyarakat menganut semua nilai yang terperinci itu akan tetapi bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Adapun nilai-nilai demokrasi yang dimaksud sebagai berikut:

Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan atau dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in changing society*). Dalam setiap masyarakat yang moderen terjadi perubahan sosial yang disebabkan faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola penduduk ataupun dalam pola perdagangan dan sebagainya. Dengan menerapkan perilaku demokrasi akan mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dengan memperhatikan publik opinion sehingga perubahan tetap terjadi secara damai. Ketiga, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum (*minimum of coercion*). Dalam pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik lebih mendasarkan pada kemauan umum dibandingkan lewat paksaan fisik maupun non fisik, seperti ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya. Golongan-golongan minoritas yang cenderung terkena paksaan akan lebih memiliki kesempatan untuk turut serta dalam memberikan pendapat yang dimiliki. Keempat, mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*) yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hal ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (*way of life*). Kelima, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak

akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbatas diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relative (*relative justice*). Keadilan yang dapat dicapai lebih bersifat jangka panjang.

Pendidikan demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:210) adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi tidak hanya berupa usaha untuk memperoleh pengetahuan. Pendidikan demokrasi, secara epistemologi diraih melalui pengalaman-pengalaman dalam perdebatan mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman mengutarakan pendapat dan mendengarkan pandangan orang lain

Winataputra (2009:68) merumuskan misi pendidikan demokrasi sebagai berikut : (1) Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan, sehingga dapat memiliki wawasan yang luas dan mendalam (*well-informed*). (2) Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam pengambilan keputusan individual dan kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta mampu mempertahankan argumentasi atas keputusan yang diambil. (3) Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kehidupan publik.

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing masyarakat untuk bertindak dan berperilaku secara demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Demokrasi sebagai konsep yaitu mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis. Sedangkan demokrasi sebagai praksis merupakan demokrasi dalam sebuah sistem melalui mana kinerja demokrasi terikat suatu peraturan tertentu, apabila dalam sistem itu ada anggotanya yang

tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi (Sunarso, 2008:102).

Pendidikan demokrasi di sekolah dilakukan agar siswa memperoleh pengalaman dalam berbagai pengambilan keputusan secara kolektif mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan sekolah. Hal tersebut mereka dapatkan melalui pembentukan kelompok-kelompok diskusi di dalam kelas maupun melalui kegiatan-kegiatan diluar jam pelajaran. Sebagai contoh pelaksanaan demokrasi yang dapat dilakukan di sekolah adalah pengangkatan dewan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah melalui pemilihan umum di Sekolah.

Menurut Dewey dalam Haricahyono (1996: 59) demokrasi sebagai suatu realitas yang lebih luas katimbang sekedar instrumen politik semata. Ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup tentang perlunya keterlibatan dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan dalam tindakan, namun terutama kebebasan kecerdasan (*freedom of intelligence*). Dewey mengatakan bahwa : *unless freedom of action (is guided) by intelligence, its manifestation is almost sure to result in confusion and disorder*. Kebebasan diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan, yang didasari oleh kebebasan dalam berpikir. Untuk dapat melakukan suatu tindakan seseorang harus memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara secara bebas, yaitu kebebasan dalam melakukan suatu tindakan, yang didasari oleh kebebasan dalam berpikir (Winarno, 2009:76).

Ada dua hal urgensi demokrasi dalam pendidikan, yaitu : *Pertama*, demokrasi sebagai sarana bagi suksesnya pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, proses pembelajaran, maupun hasil atau dampak pendidikan. *Kedua*, demokrasi sebagai sebuah sikap, nilai, atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebagai bekal dalam hidupnya. Demokrasi dalam pendidikan menjadi hal penting untuk mendukung peserta didik dalam pelaksanaan proses pendidikan. Pendidikan yang demokratis dapat mempengaruhi hasil dari pendidikan tersebut (Amal, 2010:98)

Sehubungan dengan itu Dewey mengatakan bahwa sekolah harus memikirkan masyarakat, ada hubungan kuat antara pendidikan dan sosial dalam tindakan demokrasi. Sekolah merupakan suatu kelompok sosial yang kecil (minoriti); yang menggambarkan atau menjadi cerminan dari kumpulan sosial yang lebih besar (majoriti). Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif serta menumbuhkan kekritisannya, sehingga anak didik memiliki

wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Sekolah yang demokratis menyediakan atau menciptakan contoh-contoh kehidupan di masyarakat luas yang dapat dikaji oleh peserta didiknya. Dalam pandangan Dewey, tujuan akhir setiap program pendidikan adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dalam diri peserta didik, atau meningkatkan kapasitas peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya (Haricahyono, 1996:56).

OSIS merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. OSIS di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan Di Sekolah berupa organisasi siswa intra sekolah dan merupakan organisasi resmi. Tujuan dibentuknya OSIS sebagai berikut : (a) menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh dari luar sekolah. (b) mendorong sikap, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan siswa sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. (c) sebagai tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk memantapkan kemampuan berpikir, wawasan dan pengambilan keputusan.

Salah satu ciri pokok suatu organisasi adalah memiliki berbagai macam peran atau kegunaan yang dapat disumbangkan dalam rangka pembinaan kesiswaan. Sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan, peranan OSIS adalah : (a) Sebagai wadah. Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung terciptanya tujuan kesiswaan. Oleh sebab itu OSIS dalam mewujudkan fungsinya sebagai wadah dan wahanaharus selalu bersama-sama dengan jalur lain, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Tanpa saling bekerjasama dari berbagai jalur, peranan OSIS sebagai wadah tidak akan berfungsi lagi. (b) Sebagai penggerak atau motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina dan pengurus mampu membawa OSIS selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan perubahan, dan yang paling penting memberikan kepuasan kepada anggota. Dengan bahasa manajemen OSIS mampu memainkan fungsi intelektual, yaitu mampu meningkatkan keberadaan OSIS baik secara internal maupun eksternal. Apabila OSIS dapat berfungsi

demikian sekaligus OSIS berhasil menampilkan perannya sebagai motivator. (c) Peranan yang bersifat preventif. Apabila peran yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti : menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara preventif OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Peranan preventif OSIS akan terwujud apabila peranan OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat terwujud.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Sukmadinata, 2012:54). Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai demokrasi siswa dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya.

Menurut Arikunto (1993:103), disebutkan bahwa bila populasi keseluruhan subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dikarenakan penelitian ini jumlah populasinya kurang dari angka 100, maka responden yang digunakan adalah seluruh jumlah populasi yang berjumlah 37 pengurus OSIS SMA Khadijah Surabaya.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Pengumpulan data melalui angket, digunakan untuk memperoleh informasi mengenai nilai demokrasi tentang menyelesaikan perselisihan dengan damai & secara melembaga, nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, yang dituangkan dalam beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan rancangan kegiatan dan proses penyelesaian perselisihan. Angket penelitian ini dilengkapi dengan disertai kemungkinan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dinilai paling sesuai. (2) Teknik wawancara ini digunakan untuk melengkapi dan menguatkan informasi dari pengisian angket sebelumnya, dimana jawaban responden terbatas pada alternatif jawaban yang disediakan. Wawancara dalam penelitian ini akan

menggunakan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sehingga tidak menyimpang dari tujuan pertanyaan semula serta tanya jawab dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan seseorang yang diwawancarai. Selain itu wawancara dapat digunakan untuk menguji angket yang akan dilancarkan, misalnya apakah pertanyaan dalam angket itu dapat dipahami dengan baik, apakah ada pertanyaan yang orang enggan untuk menjawab dan sebagainya (Nasution, 2012: 128) . (3) Observasi/pengamatan digunakan untuk menguatkan jawaban dari proses pengisian angket dan wawancara. Observasi juga berfungsi untuk melaksanakan pengamatan secara langsung oleh peneliti kepada para responden dan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya. Pada penelitian ini menggunakan metode observasi *non-partisipan*, yaitu peneliti datang ke sekolah, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan rencana kegiatan dan penyelesaian perselisihan. (4) Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data profil sekolah; data kepengurusan OSIS; program kerja OSIS. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan untuk mendapatkan foto-foto hasil kegiatan di lapangan yang merupakan gambaran implementasi nilai demokrasi antara lain; 1). menyelesaikan perselisihan dengan damai & secara melembaga, 2). Mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, sehingga akan lebih memperkuat data yang dihasilkan.

Teknik analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari data yang dianalisis data yang disajikan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2009:147), bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

n = Banyaknya Jumlah Pemilih Dikalikan Nilai Tertinggi

N = Nilai Maksimum, yaitu jumlah seluruh responden dikalikan nilai tertinggi

NA = Nilai Akhir

Adapun kriteria setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata sebagai berikut :

Selalu = 4
 Sering = 3
 Kadang-kadang = 2
 Tidak Pernah = 1

Setelah hasil akhir yang berupa persentase maka dikualifikasikan, untuk itu perlu adanya kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian ini mengikuti pendapat dari Arikunto (dalam Wilujeng 2007:32), kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

80%-100% = Sangat Baik
 66%-79% = Baik
 56%-65% = Cukup
 40%-55% = Kurang
 0%-39% = Kurang Sekali

Kriteria penilaian ini merupakan hasil pengkategorian dari hasil presentase yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam hasil penelitian tentang masalah yang telah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket yang diberikan kepada semua pengurus OSIS SMA Khadijah Surabaya yang berjumlah 37 pengurus dan juga melalui wawancara dengan Pembina OSIS dan beberapa pengurus OSIS . Berdasarkan data yang dihasilkan melalui angket dan wawancara, maka diperoleh gambaran implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya, berikut adalah paparan hasil yang diperoleh di bawah ini :

Implementasi demokrasi dalam kegiatan OSIS pada nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam kegiatan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Analisis yang pertama, mengenai adanya musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya.diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1:
 Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1	Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat	(27) 108 72,97%	(9) 27 24,32%	(1) 1 2,70%	(0) 0 0%	91,89%
2	Semua pengurus OSIS terlibat dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah	24 96 64,86%	11 33 29,73%	2 4 5,40%	0 0 0%	89,86%
3	Dalam kegiatan pengambilan keputusan semua pengurus OSIS aktif dalam mengutarakan ide dan pendapat	(18) 72 48,65%	(14) 42 37,84%	(4) 8 10,81%	(1) 1 2,70%	83,11%
Rata-Rata						88,27%

Berdasarkan tabel 1 di atas dari 37 responden menunjukkan bahwa 88,27% sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan selalu dilakukan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya. Persentase tersebut masuk dalam kriteria sangat baik. Dimana pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat mendapat perolehan sebesar 91,89% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Dalam proses pengambilan keputusan semua pengurus OSIS terlibat dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mendapatkan perolehan sebesar 89,86% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Dalam kegiatan pengambilan keputusan semua pengurus OSIS aktif dalam mengutarakan ide dan pendapat memperoleh posentase sebesar 83,11 % yang masuk dalam kriteria sangat baik.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada ketua OSIS, Reza Aprilia Ashanty yang menyatakan bahwa:

“Ya. Sebelum kegiatan OSIS dilaksanakan selalu dilakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat yang melibatkan seluruh pengurus OSIS. Salah satu cara untuk menyatukan ide dan pendapat masing-masing anggota OSIS agar kegiatan terlaksana dengan baik, sehingga musyawarah yang memang selalu diagendakan dalam setiap kegiatan OSIS.”

Hasil wawancara dengan ketua OSIS, Reza Aprilia Ashanty menjelaskan bahwa pengambilan keputusan

dilakukan oleh semua pengurus OSIS yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Analisis yang kedua mengenai kebebasan mengutarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2:
Kebebasan Mengutarakan Pendapat

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
4	Adanya keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan	(25) 100 67,57%	(10) 30 27,03%	(2) 4 5,41%	(0) 0 0%	90,54%
5	Mendengarkan dan menghargai pengurus lain ketika diskusi	(24) 96 64,86%	(7) 21 18,92%	(6) 12 16,22%	(0) 0 0%	87,16%
6	Memberikan kesempatan kepada pengurus lain untuk menyangkal ketika tidak sependapat dengan pendapat kita	(19) 76 51,35%	(16) 48 43,24%	(2) 4 5,41%	(0) 0 0%	86,49%
7	Semua pengurus memberikan pendapatnya tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu	(20) 80 54,05%	(16) 48 43,24%	(1) 1 2,70%	(0) 0 0%	87,16%
Rata-Rata						87,26%

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kegiatan OSIS, terdapat adanya kebebasan mengutarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yaitu memperoleh persentase sebesar 87,26% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini terlihat dari besarnya persentase yang menunjukkan adanya keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yaitu sebesar 90,54% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Sedangkan memberikan kesempatan kepada pengurus lain untuk menyangkal ketika tidak sependapat dengan pendapat kita memperoleh persentase sebesar 86,49% yang artinya adanya kesempatan pengurus lain untuk menyampaikan pendapat lain jika tidak sependapat.

Menurut penuturan dari Sekretaris II OSIS, Felisha Nur Khayana bahwa

“Dari musyawarah inilah semua pengurus OSIS diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka masing-masing. Jika ada yang tidak setuju atau memiliki saran lain untuk keberhasilan suatu kegiatan maka diberi kesempatan untuk menyampaikan itu. Namun mereka juga harus saling menghargai pendapat dari pengurus lainnya, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh seluruh pengurus OSIS.”

Hasil wawancara dengan Sekretaris II OSIS, Felisha Nur Khayana tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman pendapat dalam setiap pengambilan keputusan. Dimana semua pengurus OSIS diberi kebebasan untuk menyampaikan dan menyangkal apabila tidak sependapat. Sehingga keputusan yang diperoleh merupakan hasil dari pemikiran bersama.

Analisis ketiga mengenai hasil putusan yang dikeluarkan dari kegiatan pengambilan keputusan, dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
Hasil Putusan Yang Dikeluarkan

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
8	Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah tanpa intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kedudukan di atas (seperti ketua, wakil, dan pengurus inti)	(19) 76 51,35%	(14) 42 37,84%	(3) 6 8,11%	(1) 1 2,70%	84,46%
9	Apabila tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting	(18) 72 48,65%	(14) 42 37,84%	(4) 8 10,81%	(1) 1 2,70%	83,11%
10	Semua pihak menerima dan menjalankan keputusan yang telah diambil dalam proses musyawarah ataupun suara terbanyak (voting)	(26) 104 70,27%	(8) 24 21,62%	(3) 2 8,11%	(0) 0 0%	87,84%
Rata-Rata						88,27%

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa hasil putusan yang dikeluarkan diambil berdasarkan musyawarah tanpa intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kedudukan di atas (seperti ketua, wakil, dan pengurus inti), memperoleh sebesar 84,46% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting yang memperoleh sebesar 83,11%. Semua pihak menerima dan menjalankan keputusan yang telah diambil dalam proses musyawarah ataupun suara terbanyak (voting) yang memperoleh sebesar 87,84%. Sehingga dapat diketahui rata-rata hasil putusan yang dikeluarkan dalam kegiatan pengambilan keputusan sebesar 85,14% termasuk dalam kriteria sangat baik.

Menurut pendapat anggota OSIS, Raisa Ahdia menuturkan sebagai berikut :

“...proses pengambilan keputusan melalui musyawarah memang diutamakan. Dimana diharapkan menghasilkan putusan yang sesuai dengan ide dan pendapat semua anggota OSIS. Namun apabila dalam proses musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka dilakukan melalui suara terbanyak atau voting.”

Ketua OSIS, Reza Aprilia Ashanty juga menambahkan sebagai berikut :

“...dengan dihasilkannya putusan yang telah diambil baik melalui musyawarah yang mufakat ataupun melalui voting jika diperlukan maka semua pihak dari OSIS menerima dan menjalankan putusan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hasil putusan yang diambil telah melalui proses musyawarah ataupun suara terbanyak. Namun semua pihak menerima dan menjalankan hasil putusan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka diperoleh rata-rata dari implementasi mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman yang dilakukan OSIS SMA Khadijah Surabaya pada proses pengambilan keputusan, diperoleh hasil dalam tabel 4 :

Tabel 4

Kegiatan Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan	Nilai
Melalui musyawarah	88,27%
Kebebasan mengutarakan pendapat	87,26%
Hasil putusan yang dikeluarkan	85,14%
Total	260,67%
Rata-rata	86,89%

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa proses pengambilan keputusan pada OSIS SMA Khadijah dilakukan melalui musyawarah sejumlah 88,27%, kebebasan mengutarakan pendapat sejumlah 87,26%, dan

adanya hasil putusan yang dikeluarkan sejumlah 85,14% dengan demikian dapat dilihat rata-rata terlaksananya proses pengambilan keputusan sebesar 86,89% termasuk kriteria sangat baik yang artinya bahwa OSIS SMA Khadijah Surabaya mengikuti dan menganggap wajar adanya keanekaragaman yang dilakukan oleh dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil angket dan penuturan hasil wawancara yang diperoleh, penguatan data juga didapatkan dari hasil observasi pada tanggal 26 Juni 2015. Telah dilaksanakan kegiatan pengambilan keputusan oleh pengurus OSIS dan MPK beserta beberapa siswa yang berpartisipasi menjadi panitia penyelenggara. Agenda kegiatan pengambilan keputusan, dimaksudkan untuk menentukan tema dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-70 tahun. Pelaksanaan kegiatan pengambilan keputusan, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Keterlibatan pengurus OSIS dan MPK beserta siswa yang tergabung dalam kepanitiaan HUT Kemerdekaan RI ke-70 tahun terlihat ketika ikut secara langsung memberikan ide dan gagasan tentang tema dan kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-70 tahun. Setiap panitia diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, dan saling mendengarkan pendapat dari panitia lainnya. Penentuan tema yang semula melalui proses musyawarah untuk mufakat menemui jalan buntu ketika ada dua pilihan tema yang sama-sama dipertahankan oleh panitia. Putusan diambil melalui voting dengan memberikan kesempatan kepada tiap panitia memilih satu tema dan dipilih berdasarkan suara terbanyak. Tema yang mendapatkan suara terbanyak ketika itu, “Jiwa Kepahlawanan Menginspirasi Keberhasilan di Tingkat Global”. Dari tema yang telah terpilih semua pihak menerima dan menghargai putusan untuk dijalankan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengambilan keputusan berjalan secara lancar dan menghasilkan putusan yang diditerima oleh semua pengurus OSIS dan MPK maupun panitia lainnya.

Implementasi nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pada pelaksanaan kegiatan dilihat dari segi tanggung jawab pengurus dalam pelaksanaan kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya. Dari sub indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5
Tanggung Jawab

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah	
11	Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab agar sistem kerja tidak terganggu	(20) 80 54,05%	(12) 36 24,32%	(5) 10 13,51%	(0) 0 0%	85,13%
12	Tidak menjadikan perbedaan kepentingan dan kesibukan untuk lalai dari tugas dan kewajiban	16 64 43,24%	13 39 35,13%	4 8 10,81%	4 4 10,81%	77,70%
13	Mengesampingkan kepentingan pribadi yang memungkinkan timbulnya konflik dalam kegiatan	(20) 80 54,05%	(14) 42 37,84%	(3) 6 8,11%	(0) 0 0%	86,49%
Rata-Rata						88,27%

Berdasarkan perhitungan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa 85,13% pengurus OSIS melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dimana masuk dalam kriteria sangat baik. Begitu pula dengan adanya keanekaragaman kepentingan dalam OSIS tidak menjadikan mereka lalai dari tugas dan kewajibannya, sebanyak 77,70% dan masuk dalam kriteria baik. Dan sebanyak 86,49% mengesampingkan kepentingan pribadi yang memungkinkan timbulnya konflik dalam kegiatan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Pembina OSIS, Ibu Laily yang menyatakan bahwa :

“Kepengurusan OSIS tahun ini merupakan pengurus OSIS yang menurut saya berhasil. Tanggung jawab mereka terhadap setiap tugas mereka laksanakan dengan sangat baik. Tidak jarang saya sebagai dewan Pembina merasa sangat mudah untuk membimbing mereka. Mereka tau apa yang harus mereka kerjakan. Tidak jarang mereka melakukan koordinasi antar pengurus di luar jadwal yang ditentukan oleh OSIS. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi tidak mempengaruhi kepentingan dalam OSIS.”

Hasil wawancara dengan Pembina OSIS, ibu Lely menguatkan hasil angket bahwa pengurus OSIS melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Implementasi nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pada pelaksanaan kegiatan dilihat dari segi kerjasama pengurus dalam pelaksanaan kegiatan OSIS di SMA Khadijah

Surabaya. Dari sub indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6
Kerja Sama

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah	
14	Adanya koordinasi yang baik antar pengurus lainnya agar tugas terselesaikan dengan baik	(20) 80 54,05%	(15) 45 40,54%	(2) 4 5,41%	(0) 0 0%	87,16%
15	Membantu rekan pengurus lain ketika mengalami kendala dalam tugasnya	(14) 56 37,84%	(18) 54 48,65%	(5) 10 13,51%	(0) 0 0%	81,08%
16	Menyesuaikan diri dengan mengalah untuk menghindari konflik ketika berada dalam satu tim dengan rekan yang memiliki ego lebih besar	(16) 64 43,24%	(19) 57 51,35%	(2) 4 5,41%	(0) 0 0%	84,46%
Rata-Rata						84,23%

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rata-rata dilakukan dengan kerjasama yaitu sebesar 84,23% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Hal tersebut didasarkan dengan adanya koordinasi yang baik antar pengurus lainnya agar tugas terselesaikan dengan baik yaitu sebanyak 87,16%. Selain itu kerjasama yang dilakukan antar pengurus OSIS juga terlihat dari sikap saling membantu rekan pengurus lain ketika mengalami kendala dalam tugasnya, yaitu sebesar 81,08% yang masuk dalam kriteria baik. Menyesuaikan diri dengan mengalah untuk menghindari konflik ketika berada dalam satu tim dengan rekan yang memiliki ego lebih besar memperoleh persentase sebesar 84,46% yang masuk dalam kriteria baik.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bendahara II, Naufal Elfia Nabila bahwa :

“Dalam pelaksanaan kegiatan OSIS semua pengurus saling berkoordinasi dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang harus selesai sesuai rencana. Dan ketika ada salah satu dari rekan pengurus yang mengalami kendala atau kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka pengurus lain bersedia membantu agar kegiatan terlaksana dengan baik.”

Hasil wawancara dengan Bendahara II, Naufal Elfia Nabila menjelaskan bahwa terjalin koordinasi antar pengurus OSIS untuk bekerja sama dalam setiap kegiatan

dan tidak segan untuk saling membantu apabila mengalami kendala.

Implementasi nilai demokrasi tentang mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pada pelaksanaan kegiatan dilihat dari segi komunikasi dan keterbukaan pengurus dalam pelaksanaan kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya. Dari sub indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7
Komunikasi dan Keterbukaan

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah	
17	Melakukan evaluasi bersama rekan pengurus agar kegiatan terlaksana sesuai rencana	(31) 124 83,78%	(5) 15 13,51%	(1) 1 2,70%	(0) 0 0%	94,59%
18	Meminta kritik dan saran kepada pengurus lain mengenai kualitas kerja	(15) 60 40,54%	(19) 57 51,35%	(2) 4 5,41%	(1) 1 2,70%	82,43%
19	Menanggapi secara positif dan berusaha memperbaiki kualitas kerja ketika mendapat kritik dan saran dari pengurus lain	(19) 76 51,35%	(17) 51 45,94%	(1) 1 2,70%	(0) 0 0%	86,49%
Rata-rata						87,84%

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan OSIS, diperoleh rata-rata hasil angket yang menunjukkan komunikasi dan keterbukaan antar pengurus OSIS yaitu sebesar 87,84% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini terlihat dari besarnya persentase adanya evaluasi yang dilakukan bersama rekan pengurus agar kegiatan terlaksana sesuai rencana yang memperoleh persentase sebesar 94,59% yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Dengan adanya evaluasi kegiatan pengurus OSIS meminta kritik dan saran kepada pengurus lain mengenai kualitas kerja yang memperoleh persentase sebesar 82,43% yang masuk dalam kriteria baik. Sikap yang ditunjukkan oleh pengurus dalam menanggapi secara positif dan berusaha memperbaiki kualitas kerja ketika mendapat kritik dan saran dari pengurus lain memperoleh persentase sebanyak 86,49%, yang masuk dalam kriteria baik.

Menurut penuturan anggota OSIS, Khurrotul Aini menyatakan sebagai berikut :

“Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS selalu dilakukan berdasarkan keterbukaan dan komunikasi antar pengurus, hal ini seiring dengan adanya evaluasi yang dilakukan baik itu pada pertengahan kegiatan maupun di akhir kegiatan untuk menjadi suatu koreksi sederhana yang bisa melalui kritik dan saran dari masing-masing pengurus. Cara seperti ini dirasa sangat efektif untuk memperbaiki kualitas kerja yang kadang kurang stabil.”

Hasil wawancara dengan anggota OSIS, Khurrotul Aini menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menjadi penilaian tentang kualitas masing-masing pengurus. Cara ini sangat efektif dalam pelaksanaan kegiatan dalam OSIS.

Menurut penuturan wakil ketua MPK, M. Fariz Nahru menyatakan bahwa :

“Menanggapi kritik dan saran dari rekan pengurus mengenai kualitas kerja dalam pelaksanaan kegiatan OSIS dilakukan dengan bersikap positif dan memperbaiki kinerja yang dirasa kurang. Sepeti ketika kita memberikan kritik biasanya disertai saran yang membangun.”

Hasil penuturan dari wakil ketua MPK, M. Fariz Nahru menjelaskan bahwa setiap kritik yang diterima oleh pengurus OSIS ditanggapi secara positif dan berusaha memperbaiki kualitas kerja agar lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka diperoleh rata-rata dari implementasi mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman yang dilakukan OSIS SMA Khadijah Surabaya pada pelaksanaan kegiatan, diperoleh hasil dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan	Nilai
Tanggung jawab	83,11%
Kerjasama	84,23%
Komunikasi dan keterbukaan	87,84%
Total	255,18%
Rata-rata	85,06%

Berdasarkan table 8, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pada OSIS SMA Khadijah dilakukan secara tanggung jawab sejumlah 83,11%, terjadi kerjasama sejumlah 84,23%, dan terjalin komunikasi dan keterbukaan sejumlah 87,84%. Dengan demikian dapat dilihat rata-rata pelaksanaan kegiatan sebesar 85,06% termasuk kriteria sangat baik dalam mengikuti dan menganggap wajar adanya keanekaragaman yang dilakukan oleh OSIS SMA Khadijah Surabaya.

Berdasarkan hasil angket dan penuturan hasil wawancara yang diperoleh, penguatan data juga didapatkan dari hasil observasi pada tanggal 11 Agustus

2015. Pada kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-70 tahun, telah terlaksana sesuai perencanaan dan sukses. Tanggung jawab pengurus OSIS dan MPK beserta siswa yang berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara. Dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai bidangnya terlaksana dengan baik. Koordinasi antar pengurus dan panitia terjalin dalam kerjasama dalam hamper semua kegiatan, apabila salah satu panitia mengalami kesulitan atau kendala dalam bertugas, pengurus lain dengan segera berkoordinasi untuk membantu agar kegiatan tidak terganggu.

Secara bijak antar pengurus beserta panitia lainnya melakukan evaluasi dengan saling meminta kritik dan saran mengenai kualitas kerja ditengah banyaknya program kegiatan dan lomba yang diadakan untuk meramaikan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-70. Hal tersebut dimaksud untuk memperbaiki kualitas kinerja yang kurang sesuai dengan perencanaan awal. Tanggapan yang positif dengan memperbaiki kualitas kerja dilakukan dengan baik.

Implementasi demokrasi dalam kegiatan OSIS mengenai nilai demokrasi tentang menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga adalah melalui kompromi, mediasi dan melalui dialog terbuka. Berikut adalah hasil perolehan angket penyelesaian perselisihan melalui kompromi yang disajikan dalam tabel 9 berikut:

Tabel.9

Penyelesaian Masalah Melalui Kompromi

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah	
20	Dalam menyelesaikan masalah dilakukan dengan kepala dingin tanpa emosi yang berlebihan	(19) 76 51,35%	(13) 39 59,46%	(5) 10 13,51%	(0) 0 0%	84,44%
21	Membicarakan perselisihan dengan pihak-pihak yang terlibat	(20) 80 54,05%	(15) 45 40,54%	(2) 4 5,41%	(0) 0 0%	87,16%
22	Meminimalisir perbedaan pendapat dan tuntutan tertentu dengan mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak	(19) 76 51,35%	(17) 51 45,94%	(1) 1 2,70%	(0) 0 0%	86,49%
Rata-rata						86,03%

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa penyelesaian perselisihan dalam kegiatan OSIS di SMA Khadjjah melalui kompromi, yaitu memperoleh

persentase sebesar 86,03% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Perolehan persentase dalam menyelesaikan masalah dilakukan dengan kepala dingin tanpa emosi yang berlebihan yaitu sebesar 84,44% yang masuk dalam kriteria baik. Dalam penyelesaiannya diupayakan untuk membicarakan perselisihan dengan pihak-pihak yang terlibat, yang mendapat perolehan sebesar 87,16% yang masuk dalam kriteria baik. Meminimalisir perbedaan pendapat dan tuntutan tertentu dengan mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak memperoleh sebesar 86,49%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan dilakukan upaya kompromi agar dapat terselesaikan secara damai.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ketua OSIS, Reza Aprillia Arshanty yang menyatakan bahwa :

“Ketika terjadi suatu perselisihan dalam OSIS biasanya pihak-pihak yang berselisih membicarakan inti dari permasalahan. Ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran masing-masing pihak untuk dicarikan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi perbedaan yang terjadi. Bukan berarti tidak ada perdebatan, namun penyelesaian dilakukan secara damai dan tidak menggunakan emosi yang berlebihan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua OSIS, Reza Aprillia Arshanty dapat disimpulkan bahwa terjadi proses kompromi dalam penyelesaian suatu konflik yang dilakukan dengan tidak menggunakan emosi yang berlebihan.

Implementasi demokrasi dalam kegiatan OSIS mengenai nilai demokrasi tentang menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga adalah melalui mediasi. Berikut adalah hasil perolehan angket yang disajikan dalam tabel 10 berikut:

Tabel 10
Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah	
23	Adanya proses mediasi dan semua pihak yang berselisih setuju untuk ditengahi	(15) 60 40,54%	(19) 57 51,35%	(2) 4 5,41 %	(1) 1 2,70%	82,43%
24	Mediator dilakukan oleh seseorang yang netral dengan pihak yang berselisih	(20) 80 54,05%	(16) 48 43,24%	(1) 1 2,70 %	(0) 0 0%	87,16%
25	Mediator membantu menuntun para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima semua pihak	(19) 76 51,35%	(16) 48 43,24%	(2) 4 5,41 %	(0) 0 0%	86,49%
26	Setiap pihak yang berselisih diberi keleluasaan untuk mengungkapkan apa yang dipermasalahkan	(14) 56 37,84%	(18) 54 48,65%	(5) 10 13,51%	(0) 0 0%	81,08%
Rata-rata						84,27%

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa penyelesaian perselisihan yang dilakukan dalam kegiatan OSIS adalah dengan adanya proses mediasi, hal ini mendapatkan persentase sebesar 84,27% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Dari hasil tersebut diketahui bahwa aspek mediator membantu menuntun para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima semua pihak perolehan sebesar 86,49% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Peran dari moderator tersebut mempengaruhi terjadinya kesepakatan antar pengurus yang sedang berselisih.

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa hal lain yang juga sangat penting dalam proses mediasi yaitu setiap pihak yang berselisih diberi keleluasaan untuk mengungkapkan apa yang dipermasalahkan mendapatkan perolehan sebesar 81,08% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Dari proses ini setiap pihak yang berselisih diberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan pendapat dan pendiriannya terhadap hal yang dipermasalahkan dihadapan mediator.

Menurut penuturan Sekretaris II, Naufal Elfia Nabila yang menyatakan bahwa :

“mediasi merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan,

terutama apabila terjadi antar pengurus OSIS. Mediator yang dipilih pun sudah hafal karakter masing-masing yang berselisih jadi gak kaget ketika kita saling mempertahankan pendapat atau pendirian pada suatu hal. Devina yang biasanya jadi mediator soalnya dia sangat sabar dan paham bagaimana menghadapi kita. Tapi ketika upaya mediasi oleh pengurus OSIS tidak menghasilkan keputusan yang disetujui masing-masing pihak, baru kita melibatkan Pembina OSIS.”

Pembina OSIS, Ibu Lely juga menambahkan pendapat sebagai berikut :

“Saya pernah menjadi mediator ketika terjadi perselisihan dalam kegiatan OSIS. Tapi saya rasa sebelum pengurus melibatkan saya dalam penyelesaian perselisihan tersebut, mereka terlebih dahulu melakukan penyelesaian di kalangan pengurus. Hal tersebut terlihat dari apa yang mereka ungkapkan ke saya ketika menceritakan duduk permasalahannya, mereka sudah memiliki pemikiran tentang alternatif penyelesaiannya. Sehingga saya pikir tugas saya hanya memfasilitasi untuk menjadi penengah agar masing-masing pihak merasa tepat dengan penyelesaian tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dari Sekretaris II, Naufal Elfia Nabila menjelaskan bahwa upaya mediasi sering dilakukan apabila terjadi suatu perselisihan antar pengurus OSIS dengan adanya mediator dari salah satu pengurus OSIS yang sudah hafal dengan karakter pengurus lain. Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Pembina OSIS, Ibu Laily yang menjelaskan bahwa keterlibatan Pembina dalam upaya mediasi merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan perselisihan.

Berikut ini adalah hasil angket berupa data rata-rata hasil penelitian per sub indikator tentang penyelesaian perselisihan melalui forum dalam penerapan sub variabel penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga. Dari indikator tersebut diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel 11 berikut :

Tabel 11
Penyelesaian Perselisihan Melalui Forum

No	Pernyataan	Jumlah Responden 37				Nilai Akhir
		Selalu	Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah	
27	Penyelesaian perselisihan melalui perundingan atau dialog forum mencapai mufakat	(31) 124 83,78%	(5) 15 13,51%	(1) 1 2,70%	(0) 0 0%	94,59 %
28	Semua pihak mengikuti perundingan yang diupayakan untuk menyelesaikan perselisihan	(15) 60 40,54%	(19) 57 51,35%	(2) 4 5,41%	(1) 1 2,70%	82,43%
29	Diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pendirian, dan saran	(21) 84 56,76%	(11) 33 29,73%	(5) 10 13,51%	(0) 0 0%	85,81%
30	Menghasilkan adanya konsensus (kesepakatan kata atau permufakatan bersama)	(24) 96 64,86%	(7) 21 18,92%	(6) 12 16,22%	(0) 0 0%	87,16%
Rata-Rata						87,50%

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa sebesar 87,50% persentase angket menunjukkan adanya penyelesaian perselisihan melalui perundingan atau forum terbuka untuk mencapai mufakat. Semua pihak mengikuti perundingan yang diupayakan untuk menyelesaikan perselisihan mendapat perolehan sebesar 82,43% yang masuk dalam kriteria sangat baik. sehingga dapat diketahui bahwa penyelesaian perselisihan yang dilakukan dalam kegiatan OSIS adalah dengan adanya proses forum terbuka, hal ini mendapatkan persentase sebesar 87,50% yang masuk dalam kriteria sangat baik.

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa semua pengurus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pendirian, dan saran yang mendapat perolehan sebesar 85,81% yang masuk dalam kriteria sangat baik. Dari adanya proses forum terbuka yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan menghasilkan konsensus (kesepakatan kata atau permufakatan bersama) yang mendapat perolehan sebesar 87,16% yang masuk dalam kriteria sangat baik.

Menurut penuturan Ketua MPK, Choirus Roziqin menyatakan sebagai berikut :

“Jika terdapat permasalahan yang susah untuk dipecahkan dan sulit untuk menemukan jalan

keluarnya, maka dilakukan dalam forum dengan semua pengurus OSIS agar memberikan pendapat dan saran tentang permasalahan yang dihadapi. Sehingga bisa ditemukan jalan keluar yang disetujui oleh semua pihak.”

Hasil wawancara dengan Ketua MPK, Choirus Roziqin menjelaskan bahwa jika terdapat masalah yang sulit untuk diselesaikan maka dilakukan melalui forum untuk mencapai kata sepakat. Dari forum terbuka inilah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan disetujui oleh semua pihak.

Pembahasan

Sekolah sebagai laboratorium demokrasi yang dikembangkan oleh Dewey berpedoman pada ide pokok demokrasi, yaitu pandangan hidup tentang perlunya keterlibatan dari setiap warga negara yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif serta menumbuhkan kekritisan, sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tujuan akhir setiap program pendidikan adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dalam diri peserta didik, atau meningkatkan kapasitas peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya.

SMA Khadijah Surabaya berupaya mewujudkan sekolah sebagai laboratorium demokrasi dalam membantu peserta didik untuk memanfaatkan bakat dan mengembangkan karakternya (bersikap dan berperilaku). Sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik menjadi anggota dari suatu komunitas yang hidup, dimana peserta didik merasa turut berpartisipasi, dan memberikan sumbangan pemikiran dalam keberlangsungan komunitas. Sekolah menyediakan atau menciptakan wadah bagi peserta didik untuk belajar secara langsung dalam kelompok sosial yang kecil (minoriti); yang menggambarkan atau menjadi cerminan dari kumpulan sosial yang lebih besar (majoriti). Kegiatan-kegiatan OSIS yang kompleks merupakan contoh-contoh kehidupan di masyarakat luas yang dapat dikaji oleh peserta didiknya.

Salah satu wadah yang menjadi tempat untuk menerapkan konsep nilai-nilai demokrasi di SMA Khadijah Surabaya adalah kegiatan berorganisasi. OSIS merupakan salah satu organisasi di sekolah yang menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan pembelajaran nyata dalam berpolitik secara demokratis pada tataran sekolah. Sekolah memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk mengurus organisasi dengan dibentuknya kepengurusan OSIS yang memiliki struktur

yang terkoordinir dan memiliki kegiatan yang terprogram yaitu program kerja OSIS. Dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya, sekolah berperan sebagai fasilitator bagi para pengurus OSIS, yaitu berupaya memfasilitasi pengurus OSIS dengan menunjuk 3 Staff Pembina OSIS yaitu Bapak Anjar Hari Purwoko, S. Pd, Ibu Khusrotul Lailiyah, S. Pd, dan Bapak Yusuf Kurniawan, S.Pd, untuk membimbing kepengurusan OSIS apabila dalam menjalankan tugasnya menemui kendala ataupun kesulitan.

Berbagai kegiatan yang ada dalam OSIS mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengurusnya untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merancang kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut. Keterlibatan pengurus di dalam kegiatan OSIS adalah bentuk proses belajar melalui pengalaman langsung, belajar bukan hanya mengamati, tetapi terlibat langsung dalam kegiatan. Melalui pengalaman-pengalaman dalam kegiatan pengambilan keputusan, pengalaman merancang dan melaksanakan rencana kegiatan, serta pengalaman penyelesaian perselisihan. Pengurus OSIS mengalami proses pemahaman secara konkret dari keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan pengambilan keputusan dalam OSIS merupakan kegiatan yang melibatkan pengurus dalam pembelajaran demokrasi secara langsung. Suasana demokratis terlihat ketika dalam pelaksanaannya semua pengurus OSIS aktif dalam mempengaruhi hasil putusan. Kebebasan berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan memunculkan keanekaragaman pendapat, yaitu dengan banyaknya pengurus OSIS yang memberikan ide dan pemikiran. Proses pengambilan keputusan merupakan bentuk kebebasan dalam berpikir dan memberikan sumbangan pemikiran. Kebebasan pemikiran memunculkan banyaknya pendapat dalam kegiatan OSIS, dan penghargaan atas kebebasan orang lain dapat terlaksana dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kegiatan pengambilan keputusan sudah terimplementasi nilai demokrasi yaitu mengikuti dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Pelaksanaan kegiatan dalam OSIS dilaksanakan secara bertanggung jawab dan terjalin kerjasama yang baik antar pengurus OSIS. Kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi bukti bahwa keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan serta keanekaragaman perilaku bisa disikapi dengan positif oleh masing-masing pengurus. Hal tersebut dianggap wajar oleh pengurus, karena dalam pelaksanaan kehidupan yang demokratis memunculkan kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan implementasi dari nilai demokrasi

yang sesuai dengan pendapat Mayo yaitu mengikuti dan menganggap wajar keanekaragaman.

Penyelesaian konflik dalam OSIS dilakukan secara terorganisir sesuai dengan konsep demokrasi. Kesadaran akan keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan dan keanekaragaman perilaku yang mudah memunculkan konflik dalam OSIS membuat pengurus berusaha menyikapinya dengan mengedepankan upaya penyelesaian konflik secara damai dan melembaga. hal ini terimplementasi dengan adanya penyelesaian konflik melalui kompromi, mediasi dan dialog terbuka (forum). Sekolah melalui Staff Pembina OSIS, memfasilitasi para pengurus untuk menyelesaikan perselisihan dengan meminimalkan adanya tindakan kekerasan dan mencari solusi penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga siswa terlibat untuk memikirkan solusi yang tepat untuk kepentingan bersama.

Kegiatan OSIS melibatkan langsung peserta didik dalam kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan penyelesaian konflik. Pengalaman yang mereka peroleh dari kegiatan OSIS sebagai satu sarana yang memungkinkan untuk merekonstruksi atau memahami konteks permasalahan atau realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara langsung pengurus OSIS melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam lingkup yang lebih kecil. Sekolah melalui kegiatan OSIS menjadi laboratorium dalam pengembangan dan pelaksanaan konsep demokrasi.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan merupakan inti daripada suatu penelitian yang telah dilaksanakan, dengan adanya suatu kesimpulan maka akan memperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Berdasarkan analisis data seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, implementasi nilai mengikuti dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya adalah sudah terimplementasi dengan sangat baik dalam kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, kebebasan mengutarakan pendapat terorganisir dengan baik, hal ini terbukti dengan hasil putusan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Pelaksanaan kegiatan dalam OSIS dilaksanakan secara bertanggung jawab dan terjalin kerjasama yang baik antar pengurus OSIS. Kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi bukti bahwa keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan serta keanekaragaman perilaku bisa disikapi dengan positif oleh masing-masing pengurus. Sekolah memberikan kesempatan kepada pengurus OSIS aktif

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merancang kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut. Terimplementasinya nilai demokrasi dalam OSIS merupakan bentuk dari terwujudnya konsep sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Dimana setiap individu diberikan keleluasaan dalam mengembangkan dan mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam dirinya.

Implementasi nilai demokrasi tentang penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga, dalam kegiatan OSIS di SMA Khadijah Surabaya adalah sudah terimplementasi dengan sangat baik. Kesadaran akan keanekaragaman pendapat, kepentingan dan perilaku yang mudah memunculkan konflik dalam OSIS membuat pengurus berusaha menyikapinya dengan mengedepankan upaya penyelesaian konflik secara damai dan melembaga. hal ini terimplementasi dengan adanya penyelesaian konflik melalui kompromi, mediasi dan dialog terbuka (forum). Sekolah melalui Staff Pembina OSIS, memfasilitasi para pengurus untuk menyelesaikan perselisihan dengan meminimalkan adanya tindakan kekerasan dan mencari solusi penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga siswa terlibat untuk memikirkan solusi yang tepat untuk kepentingan bersama.

Saran

Berdasarkan tentang hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah maka kami memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Untuk siswa-siswa yang ikut dalam kepengurusan OSIS hendaknya menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.

Untuk kepengurusan OSIS hendaknya mengadakan rapat rutin untuk evaluasi yang diadakan ketika berjalannya suatu kegiatan agar bisa mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pengurus dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Daya dukung sekolah untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pemberian materi mengenai budaya demokrasi dalam organisasi secara berkala dalam satu masa kepengurusan agar pengurus OSIS bisa menganalisis dan menerapkannya dalam setiap kegiatan OSIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Azra, Azumardi. 2001. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional :Rekosiliasi dan Demokratisasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewey, John. 2002. *Pengalaman & Pendidikan*. Terjemahan John de Santo. Yogyakarta: Kepel Press.

Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Refika Aditama.

Harichayono, Cheppy. 1995. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008: *Penbinaan Kesiswaan*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional.

Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Perenada Media.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda.

Sunarso. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan : PKN Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.

Syarbaini, Syahrial. 2010. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winataputra U.S dan Budimansyah, D. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar & Kultur Kelas*. Bandung: Prodi PKN SPS UPI.

Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Garin Kalam Utama.

Devendorf, Steven.____. *John Dewey: A Pioneer in Educational Philosophy*. TED502. State University College at Oswego (http://john/deweyschool/thela008095mbp_djvu.txt.htm). Diakses pada 14 Januari 2016.